BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) dalam sistem demokrasi merupakan tata cara pergantian kekuasaan. Pemilihan umum memiliki esensi sebagai wadah rakyat dalam menjalankan demokrasi juga mendirikan struktur pemerintahan. Pemilihan umum ini dijadikan kunci keberhasilan disuatu negara demokrasi, dikarenakan dalam pemilihan umum ini terbukti masyarakat ikut berpartisipasi yang bertujuan memilih secara langsung calon pejabat pemerintahan. Pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana pendidikan politik, dengan maksud untuk meningkatkan wawasan dan kesadaran masyarakat mengenai hal demokrasi.

Pemilu di Indonesia memajukan partai politik dalam melaksanakan rekrutment sesuai dengan strategi pemenangan masing-masing partai. Efek dari rekrutment ini akan memunculkan politikus yang akan berupaya menarik hati masyarakat. Di Indonesia kini kondisi politikus mengalami progres (Akbar, 2021). Dengan peranan diatas, partai politik berusaha untuk mencalonkan kader-kader terbaik untuk dapat memenuhinya. Partai politik juga mempunyai peran sebagai penataan kader politik yang akan dibimbing dan dibentuk untuk mampu mengerti akan fungsi dan peranan bagaimana ketika menjadi seorang pemimpin (Hendrarto, 2006). Kader yang telah melakukan seleksi dalam kaderisasi tersebut juga dianggap berpengalaman oleh partai politiknya akan ditugasi untuk menduduki struktur jabatan didalam pemerintahan. Kaderisasi tidak hanya dibutuhkan untuk mencari calon-calon pemimpin, namun diperlukan oleh partai untuk mampu memobilisasi mesin partai politik untuk mendapatkan massa dan suara sebanyak mungkin sehingga partai tersebut bisa berbicara banyak dalam kontestasi politik.

Banyak strategi yang dilakukan oleh partai politik yang bersaing untuk memperoleh suara yang terbanyak baik untuk mengkapanyekan partai politiknya sebaik mungkin dan bisa juga mencalonkan kader-kader yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

sekiranya dapat memberikan peluang kemenangan dan mendapatkan suara banyak untuk partai mereka. Salah satu langkah yang diambil oleh partai politik yaitu dengan merekrut selebriti ke dalam partainya untuk menjadi kontestan dalam pemilu.

Salah satu fenomena menarik yang sering terjadi pada belakangan ini yaitu semakin banyaknya partai politik yang melakukan kaderisasi terhadap selebriti yang memiliki popularitas yang sangat tinggi. Mubarok (2012) mengemukakan Mdel kaderisasi selebriti menjadi calon legislatif untuk memberikan hasil suara yang tinggi bagi partai politik disetiap mendekati pemilu legislatif merupakan *trend* juga model baru. Di Indonesia fenomena selebriti menjadi calon legislatif bukanlah hal baru, sejak tahun 1971 selebriti sudah turun kedalam dunia politik (Wicaksono & Aziz, 2020). Menghadapi pemilu 2024 sekurangnya terdapat 76 selebriti yang akan menjadi bakal calon legislatif yang berawal dari sebagian partai politik.

Perihal strategi partai politik dalam menggapai kemenangan dalam pemilu legislatif, daya tarik seorang selebriti karena telah memiliki popularitas yang menjadikan modal sosial yang sangat besar. Itulah faktor yang menjadikan partai politik mengkader selebriti. Partai politik lebih menentukan untuk melibatkan selebriti dibandingkan melibatkan tokoh yang tidak mempunyai modal popularitas untuk dijadikan kandidat pada pemilu legislatif (Darmawan, 2015).

Selebriti adalah seseorang yang dikenali oleh kebanyakan masyarakat, dikenali karena kompetensinya maupun profesinya. Selebriti merujuk pada individu yang meraih popularitasnya lewat media massa sehingga seseorang mudah dikenal oleh masyarakat (Darmawan, 2015). Pada pemilu legislatif pencalonan selebriti menunjukkan partai politik menetapkan untuk memilih selebriti karena sudah memiliki popularitas. Hal ini menunjukkan belum maksimalnya proses rekrutmen pada partai politik dan lebih memilih sisi popularitasnya dibandingkan dengan memaksimalkan proses kaderisasi pada partainya. Dalam dunia politik power seorang selebriti sangat membuktikan terpilihnya dalam pemilihan. Selebriti mempunya faktor popularitas yang membuatnya selangkah lebih maju dibandingkan dengan calon non selebriti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

(Hakim, 2012). Beberapa caleg yang berasal dari kalangan selebriti di dapil 1 Jawa Barat diantaranya terdapat Melly goeslaw dan Nurul Arifin. Berikut ini merupakan tabel yang memuat daftar calon legislatif yang berasal dari selebriti dan dari berbagai partai politik :

Tabel I.1 Daftar Calon Legislatif Selebriti di Dapil 1 Jawa Barat 2024

No	Nama Calon Legislatif	Partai	Keterangan
1.	Melly Goeslaw	Gerindra	Lolos
2.	Marcell Siahaan, S.H.	PDIP	Tidak Lolos
3.	Nico Siahan	PDIP	Lolos
4.	Nurul Arifin, M.Si.	Golkar	Lolos
5.	Muhammad Farhan	Nasdem	Tidak Lolos
6.	Giring Ganesha Djumaryo	PSI	Tidak Lolos

Sumber : Komisi Pemilihan Umum (diolah peneliti), 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Data tabel diatas merupakan data nama caleg yang mengikuti rekrutmen yang berasal dari beberapa partai yaitu partai gerindra, PDIP, golkar, nasdem dan PSI. meskipun para calon legislatif selebriti ini memiliki ketenaran juga popularitas yang tinggi, namun bukan berarti dapat mudah untuk bisa terpilih dan menduduki bangku di Senayan.

Dilihat pada tabel diatas pada pileg 2024 Dapil 1 Jawa Barat hanya ada 6 caleg selebriti dari 123 caleg non selebriti dam dari 6 caleg selebriti tersebut hanya 3 terpilih. Jumlah calon legislatif yang latar belakangnya selebriti akan bertambah jika diperluas definisi selebriti politisi tidak hanya melihat pada mereka yang berangkat dari dunia hiburan. West & Orman (2003) mengemukakan 4 aspek selebriti politisi ini diantaranya 1. mendapatkan popularitas dari penerus orang tua atau pasangan dengan latar belakang politisi

2. Memiliki promosi diri dan skill public 3. Selebriti yang muncul tiba-tiba dan mendapatkan perhatian media karena sebuah peristiwa penting 4. Tokoh terkenal yang bukan berasal dari dunia politik, melainkan industri hiburan (West & Orman, 2003). Dengan adanya selebriti yang dicalonkan sebagai perwakilan partai politiknya secara tidak langsung menggambarkan perpolitikan di Indonesia ini lebih didorong oleh faktor personalitas dibandingan partainya sendiri. Hal ini penelitian terhadap selebriti dan politik semakin menarik untuk dibahas, berawal dari meningkatnya partai politik yang merekrut selebriti sebagai keterwakilan dan banyaknya jumlah selebriti yang ikut serta memeriahkan dalam perpolitikan di Indonesia, lebih spesifiknya dalam pemilihan legislatif (Darmawan, 2015).

Partai politik ini berhak untuk merekrut anggota-anggotanya untuk bersaing dalam pemilihan umum (Gaffar, 2005). Partai lebih merekrut sosok calon untuk keterwakilannya yang memiliki popularitasnya tinggi, mempunyai modal dalam hal keuangan yang kuat atau yang sudah berpengalaman menduduki posisi jabatan tertentu (Syahrul, 2010). Akan tetapi berbeda dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu partai politik yang berdasarkan pada Islam dan juga menerapkan nilai Ukhuwah Islamiyah dan selalu memprioritaskan musyawarah mufakat bertujuan mengatasi permasalahan yang berada dalam tingkat masyarakat ataupun kenegaraan.

Partai yang berideologi Islam salah satunya adalah partai PKS yang memiliki usaha untuk meningkatkan jumlah anggota kadernya pada setiap waktunya, sehingga dapat diteliti dengan berjalannya dunia demokrasi juga menetapkan klasifikasi juga aturan menjaring kadernya, bagaimana PKS menghidupkan ideologi Islam kepada anggota kadernya untuk menjadikan kader yang berkualitas juga menjadikan Islam sebagai landasannya (Arrasyid et al., 2020).

Dalam pemilihan legislatif PKS ini tidak merekrut selebriti sebagai keterwakilan dari partainya, Berikut adalah tabel daftar calon legislatif partai PKS :

Tabel I.2 Daftar Calon Legislatif Dapil 1 Jawa Barat Partai Keadilan Sejahtera Non Selebriti

No	Nama Calon Legislatif	Partai	Keterangan
1.	Hj. Ledia Hanifa A., S.Si., M.Psi. T.	PKS	Non Selebriti
2.	Dr. H. Haru Suandharu, S.Si., M.Si.	PKS	Non Selebriti
3.	Prof. Dr. Sanusi Uwes, M.Pd.	PKS	Non Selebriti
4.	Tedy Setiadi, S.Sos.	PKS	Non Selebriti
5.	Dr. Auliya Rahmi Fadlilah	PKS	Non Selebriti
6.	Hendra Setiawan, S.E., M.M.	PKS	Non Selebriti
7.	Sri Cholifah	PKS	Non Selebriti

Sumber : Komisi Pemilihan Umum (diolah peneliti), 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa calon legislatif yang menjadi perwakilan partai PKS tidak ada satupun yang berangkat dari selebriti karena PKS dari sisi kaderisasinya mewajibkan kadernya terlibat aktif dalam pelatihan pembinaan kader. Pembinaaan ini meliputi pelatihan keorganisasian, pembinaan evaluasi dan karakter. Partai PKS ini membuktikan bahwa populatitas bukanlah menjadi point yang pertama dalam mengusung kader, jika hal yang diutamakan adalah modal popularitas maka tidak cukup untuk seorang kader memiliki suara sebanyak mungkin dan harus mempunyai kompotensi dalam dunia politik. Partai politik yang masih menggunakan selebriti menjadi anggota legislatif dari tahun ke tahun merupakan kegagalan dalam perekrutan dari partai politik dan akan menjadi hambatan dalam keberlangsungan dalam menjalankan perannya menjadi tokoh politik.

Rekrutmen pada calon anggota merupakan hal yang penting dalam organisasi salah satunya partai politik. Pola rekrutmen juga kaderisasi ini merupakan faktor krusial yang menentukan kelangsungan hidup sebuah partai

politik. Partai politik hanya dapat bertahan menghadapi berbagai tantangan dan perubahan zaman jika mampu menjalankan regenerasi dengan baik. Pada dasarnya eksistensi partai sangat bergantung pada pola kaderisasi yang bertujuan menghasilkan kader yang terbaik. Untuk memastikan regenerasi berjalan dengan baik sebagai kelanjutan dari rekrutmen yang dilakukan, sangat penting bagi partai politik menjalankan proses kaderisasi yang terstruktur dan berjenjang. Kaderisasi efektif setidaknya harus memiliki beberapa aspek yang ditujukan untuk para kadernya (Harun, 2006).

Partai PKS ini menunjukkan keberhasilan partainya dengan hasil yang memuaskan, dengan tidak mengkaderisasi selebriti yang dilakukan untuk meningkatkan popularitasnya. Berdasarkan data yang telah didapatkan membuktikan adanya kenaikan suara yang didapati oleh partai PKS pada tahun 2019 dan 2024.

Tabel 1.3 Data Kenaikan Suara Partai PKS di Jawa Barat Tahun 2019 dan 2024

Tahun	Jawa Barat
2019	3.286.606
2024	3.801.216

(Sumber Komisi Pemilihan Umum dan Nasional.Kompas.com)

Data pada tabel diatas menunjukkan adanya kenaikan suara pada partai PKS pada pemilu 2024 di Jawa Barat dengan meraih total suara 3.801.216 dibandingan dengan tahun 2019 yang hanya meraih total suara 3.286.606. Hal ini membuktikan bahwasannya selebriti tidak berpengaruh.

Kajian mengenai strategi politik partai di Indonesia telah banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian terdahulu lebih menyoroti peran figur publik atau selebriti sebagai instrumen utama dalam meningkatkan popularitas partai politik. Sebagai contoh, penelitian Pranoto (2020) menunjukkan bahwa keterlibatan selebriti dalam kampanye politik mampu meningkatkan popularitas partai secara instan melalui efek eksposur media yang

luas. Akan tetapi, strategi berbasis selebriti cenderung memiliki kelemahan dalam membangun loyalitas jangka panjang pemilih, karena popularitas yang diperoleh lebih bersifat situasional dan kurang terikat pada identitas ideologis partai. Dengan demikian, terdapat kesenjangan kajian yang mengulas secara komprehensif strategi partai yang tidak mengandalkan figur publik, melainkan fokus pada penguatan basis kader, kedekatan dengan masyarakat, dan konsistensi ideologi.

Penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh Putra (2019), lebih banyak membahas strategi pemenangan pemilu pada level nasional tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap konteks dan dinamika di tingkat daerah pemilihan. Padahal, sebagaimana ditegaskan Norris (2000), faktor-faktor lokal seperti latar belakang sosial, demografi, tingkat religiusitas, dan struktur jaringan sosial masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas strategi politik. Dapil I Jawa Barat, misalnya, memiliki karakteristik pemilih yang unik, baik dari segi latar belakang sosial-ekonomi maupun nilai keagamaan, sehingga strategi politik yang diterapkan di wilayah ini tidak dapat serta-merta disamakan dengan strategi pada wilayah lain. Kekosongan kajian pada level daerah inilah yang berusaha diisi oleh penelitian ini.

Selain itu, walaupun terdapat studi yang meneliti kaderisasi partai politik, seperti yang dilakukan Syamsuddin (2021), fokus kajiannya lebih menekankan pada mekanisme internal organisasi tanpa secara eksplisit mengaitkan proses tersebut dengan peningkatan popularitas dan elektabilitas partai. Penelitian ini berupaya melengkapi celah tersebut dengan menganalisis bagaimana strategi kaderisasi yang sistematis, terstruktur, dan berjenjang dapat berperan langsung dalam membangun citra positif dan memperluas jangkauan dukungan publik, khususnya di wilayah yang menjadi basis elektoral PKS.

Tidak hanya itu, sebagian besar penelitian terdahulu masih memandang popularitas politik semata-mata dari sudut pandang media exposure, sementara dimensi hubungan interpersonal, kedekatan emosional, dan interaksi tatap muka dengan pemilih sering kali terabaikan. Seperti diungkapkan oleh Lees-Marshment (2014), *political branding* yang kuat tidak hanya dibangun melalui

media massa, tetapi juga melalui pengalaman langsung pemilih terhadap nilai, program, dan sikap partai. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menempatkan strategi komunikasi politik langsung dan pendekatan berbasis komunitas sebagai komponen penting dalam membangun popularitas jangka panjang.

Dengan menggabungkan analisis strategi kaderisasi, komunikasi politik, dan pembentukan citra tanpa selebriti dalam konteks Dapil I Jawa Barat, penelitian ini mengisi kekosongan kajian yang belum banyak dibahas oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis pada pengembangan literatur strategi dan popularitas politik, tetapi juga kontribusi praktis bagi partai politik yang ingin merumuskan strategi efektif di wilayah dengan karakteristik sosial dan budaya tertentu. Dengan kata lain, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai bagaimana popularitas dapat dibangun secara berkelanjutan melalui strategi politik yang konsisten dengan identitas ideologi dan aspirasi masyarakat setempat.

Pada pembahasan diatas menjadikan topik ini menarik untuk diangkat sebagai penelitian mengenai selebriti menjadi politisi, karena pada umumnya selebriti beerangkat dari dunia entertainment sehingga popularitasnya lebih tinggi dibandingkan kader non selebriti, dalam pileg 2024 masyarakat cenderung memilih caleg yang dikenali dan partai PKS berhasil membuktikan bahwa selebriti bukan hal yang penting dalam proses rekrutmen, dengan adanya kenaikan suara partai PKS di Jawa Barat pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2019, strategi bagaimana yang dilakukan PKS sehingga bisa bersaing dengan partai lain yang mengusung kader selebriti, maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian mengenai PKS tidak melakukan rekrutmen terhadap selebriti dengan judul "**Strategi Partai Keadilan Sejahtera Dalam Meningkatkan Populatias Tanpa Selebriti Pada Pileg 2024 Dapil 1 Jawa Barat**"

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini, rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi PKS dalam meningkatkan popularitasnnya pada pemilu legislatif 2024 tanpa selebriti di Dapil 1 Jawa Barat?
2. Bagaimana dampak strategi PKS dalam meningkatkan popularitasnya tanpa selebriti pada pemilu legislatif 2024 di Dapil 1 Jawa Barat?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menggambarkan strategi PKS dalam meningkatkan popularitasnya tanpa mengusung selebriti menjadi politisi pada pemilu legislatif 2024 di Dapil 1 Jawa Barat.
2. Untuk menggambarkan dampak strategi dalam meningkatkan popularitasnya tanpa selebriti pada pemilu legislatif 2024 di Dapil 1 Jawa Barat.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan wawasan pengentahuan juga menjadi rujukan ilmiah untuk penelitian lain dengan pembahasan strategi PKS dalam meningkatkan popularitasnya tanpa mengusung selebriti menjadi politisi.
2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan bisa memberikan bahan masukan dan pemikiran yang berguna bagi pembaca dan khalayak umum

mengenai masalah strategi PKS dalam meningkatkan popularitasnya tanpa mengusung selebriti menjadi politisi.

D. Kerangka Berpikir

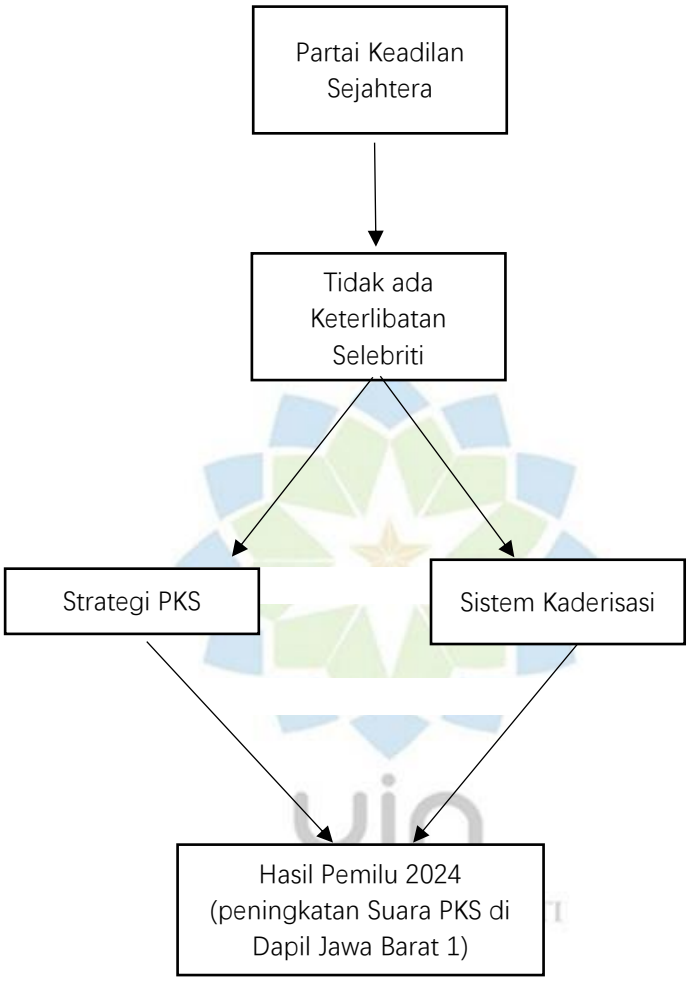

Tabel 1.4 : Kerangka Berpikir

Gambar diatas merupakan kerangka berpikir dari penelitian yang berjudul "Strategi Partai Keadilan Sejahtera Dalam Meningkatkan Popularitas Tanpa Mengusung Selibriti Menjadi Politisi (Studi Kasus: Dapil 1 Jawa Barat). Rangkaian dibawah ini adalah penjelasan singkat dimana PKS ini dalam mengikuti pemilu legislatif 2024 yang mana pemilu ini merupakan wadah untuk rakyat dalam sebuah negara demokrasi. Pada pemilu 2024 partai PKS tidak mengusung selebriti untuk dijadikan perwakilan partainya untuk berkontestasi dengan partai lain dalam menaikkan popularitasnya di pileg 2024 di dapil 1 Jawa Barat. Hal ini tentunya memunculkan berbagai polemik yang ada, permasalahan

yang dimana partai lain menggunakan selebriti untuk dijadikan poin utama dalam menaikkan popularitasnya. Pileg 2024 ini membutuhkan anggota yang berkualitas, maka dari itu PKS me-manifensikan untuk ikut serta pada pemilu tahun 2024. PKS ini merupakan salah satu partai yang mempunyai ideologi Islam dan mempunyai basis kader yang loyal dan kuat. Maka bagi peneliti tampaknya perlu untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan PKS dengan meningkatkan popularitasnya tanpa ada perwakilan dari selebriti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG